

SINOPSIS

Berdasarkan Perda DIY No 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial DIY berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Di dalam penelitian ini penulis mengetahui seberapa efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam menangani gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data lewat wawancara mendalam (in-depth interview) untuk mendapatkan data primer dan teknik dokumentasi dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti: Peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dalam mengukur efektivitas kebijakan Perda No 1 tahun 2014 penulis menggunakan ukuran dari efektivitas yaitu (1) Pencapaian tujuan : kurun waktu, sasaran dan dasar hukum (2) Integrasi : prosedur dan proses sosialisasi (3) Adaptasi : peningkatan kemampuan dan sarana & prasarana sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Namun dari hasil penelitian dari 7 indikator tersebut masih menunjukkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan. Hal hal berikut yaitu dalam proses kurun waktu satu tahun dirasa masih kurang karena berkaitan dengan proses sosialisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Proses sosialisasi masih dirasa kurang karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di DI Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya gepeng dan masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan perda ini.

Dinas Sosial DIY dalam pelaksanaan Perda sudah sesuai dengan prosedur namun dirasa masih kurang kurun waktu serta kegiatan penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap gelandangan dan pengemis. Berdasarkan data yang didapat juga masih menunjukkan jumlah gelandangan dan pengemis di Yogyakarta masih banyak.

Jadi dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan pelaksanaan kebijakan penanganan gepeng belum efektif perlunya lagi melakukan evaluasi terhadap program kegiatan sehingga dalam pelaksanaan Perda no 1 tahun 2014 bisa maksimal.

Kata kunci : efektivitas program, pelaksanaan kebijakan, penanganan gelandangan dan pengemis